



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ADRIANSYAH

NIK : 6472031609790004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA KOTA BARU

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2019

Tanggal Kirim : 15 Januari 2020

**Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:**

- Lengkap
- Tidak Lengkap



*\*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA KOTA BARU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADRIANSYAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 453379

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>420.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/80 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>128.500.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, - SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA 2TP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>62.700.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.334.539</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>620.534.539</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>237.930.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>382.604.539</b>

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.